

Katalog : 4601003.52

# STATISTIK POLITIK

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2016



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



# STATISTIK POLITIK

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2016

# STATISTIK POLITIK

## Provinsi Nusa Tenggara Barat 2016

**ISBN** : -  
**No. Publikasi** : 52520.1704  
**Katalog BPS** : 4601003.52

**Ukuran Buku** : 17,6 x 25 cm  
**Jumlah Halaman** : xii + 40 halaman

**Naskah:**

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

**Desain Cover:**

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

**Diterbitkan Oleh:**

© Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat*

## KATA PENGANTAR

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPS Provinsi NTB) berupaya memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik diantaranya menerbitkan Publikasi Statistik Politik Nusa Tenggara Barat 2016. Hal ini juga tidak terlepas dari tugas BPS untuk penyediaan dan publisitas data beragam dan berkualitas merupakan hal yang tak terelakkan lagi dimasa mendatang, sehingga BPS berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan publikasi ini berasal dari data Polres/ Polresta/ Polda, DPRD, KPU, dan Kesbangkespol di NTB. Publikasi berisikan informasi terkait situasi politik di Nusa Tenggara Barat berdasarkan data hasil pemilukada terakhir serta peraturan daerah yang dihasilkan DPRD.

Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan data dan penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini sangat diharapkan agar penyusunan berikutnya lebih sempurna.

Mataram, September 2017

**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
Kepala,

**ENDANG TRI WAHYUNINGSIH**

---

<http://ntb.bps.go.id>

---

# ABSTRAKSI

Situasi politik di NTB dapat digambarkan diantaranya dengan hasil Pemilu Legislatif dan Pemilukada yang terakhir dilaksanakan. Untuk pemilu legislatif di tingkat provinsi, hasil perolehan suara terbanyak diraih Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Bintang Restorasi. Jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih sebanyak 3.499.265 jiwa, 70,05 persen diantaranya menggunakan hak pilih dan 29,95 persen golput. Dari jumlah perolehan suara tersebut 95,53 persen suara dinyatakan sah dan 4,47 persen suara tidak sah.

Jumlah peraturan daerah (perda) yang dihasilkan DPRD Provinsi pada tahun 2015 sama jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, yaitu 12 perda. Dari jumlah tersebut, 3 diantaranya merupakan inisiasi dari DPRD.

Lebih dari 93 persen penduduk yang terdaftar dalam DPT telah menggunakan hak pilihnya di pemilukada terakhir Kabupaten Dompu. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan kabupaten kota lain se- NTB. Sedangkan Kota Mataram merupakan wilayah dengan persentase suara sah terhadap DPT terendah dibanding kabupaten/kota lain se-NTB dengan besaran 51 persen.

Demokrasi merupakan bagian dari sistem politik yang memberikan keadilan dan persamaan hak bagi semua warga negara. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) NTB dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2016, IDI NTB sebesar 65,41 naik 0,33 poin dibandingkan dengan IDI NTB 2015 yang sebesar 65,08. Dengan pencapaian nilai IDI tersebut, tingkat kinerja demokrasi di NTB tetap bertahan pada kategori sedang.

Dari data IDI 2015 diperoleh informasi variabel-variabel yang perlu mendapat perhatian lebih, diantaranya variabel kebebasan berkeyakinan, variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, variabel peran DPRD, dan terakhir variabel peran birokrasi pemerintah daerah.

---

<http://ntb.bps.go.id>

---

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAKSI.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
PENDAHULUAN.....	1
I. LATAR BELAKANG.....	1
II. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
III. RUANG LINGKUP.....	3
IV. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	3
METODOLOGI.....	5
I. JENIS DAN SUMBER DATA.....	5
II. KONSEP DAN DEFINISI.....	5
GAMBARAN UMUM PROVINSI NTB.....	9
GAMBARAN UMUM POLITIK NTB.....	11
I. PEMILU LEGISLATIF TERAKHIR.....	11
II. PERAN DPRD.....	12
III. PEMILIHAN KEPALA DAERAH TERAKHIR.....	13
IV. PERKEMBANGAN DEMOKRASI INDONESIA.....	17
TABEL-TABEL.....	21



---

<http://ntb.bps.go.id>

---

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB 2016.....	23
Gambar 2.	Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2015-2016.....	24
Gambar 3.	Persentase Pemilih dalam Pemilu pada Terakhir Menurut Hasil Perolehan suara dan Kabupaten/Kota di NTB.....	25
Gambar 4.	Perkembangan Indeks Demokrasi NTB, 2011-2016.....	26
Gambar 5.	Perkembangan Aspek Indeks Demokrasi Indonesia NTB 2011-2016.....	27

---

<http://ntb.bps.go.id>

---

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/kelurahan, dan Penduduk di NTB Tahun 2016.....	23
Tabel 2.	Jumlah Anggota DPRD Provinsi menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat Tahun 2016.....	24
Tabel 3.	Jumlah Anggota DPRD menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Lombok Barat Tahun 2016.....	25
Tabel 4.	Jumlah Anggota DPRD menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Lombok Tengah Tahun 2016.....	26
Tabel 5.	Jumlah Anggota DPRD menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Lombok Timur Tahun 2016.....	27
Tabel 6.	Jumlah Anggota DPRD menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Sumbawa Tahun 2016.....	28
Tabel 7.	Jumlah Anggota DPRD menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Dompu Tahun 2016.....	29
Tabel 8.	Jumlah Anggota DPRD menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Bima Tahun 2016.....	30
Tabel 9.	Jumlah Anggota DPRD menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Sumbawa Barat Tahun 2016.....	31
Tabel 10.	Jumlah Anggota DPRD menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Lombok Utara Tahun 2016.....	32
Tabel 11.	Jumlah Anggota DPRD menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Mataram Tahun 2016.....	33
Tabel 12.	Jumlah Anggota DPRD menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Bima Tahun 2016.....	34
Tabel 13.	Jumlah Penduduk yang Terdaftar dalam Pemilu Legislatif Terakhir dan Hasil Perolehan Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Golput di Nusa Tenggara Barat.....	35

---

Tabel 14.	Waktu Pelaksanaan dan Banyaknya Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota Terakhir di Nusa Tenggara Barat.....	36
Tabel 15.	Jumlah Pemilih Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.....	37
Tabel 16.	Perolehan Suara dan Partai Pendukung Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.....	38
Tabel 17.	Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Hasil Pilkada Terakhir Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, Usia dan Jabatan Sebelumnya di Nusa Tenggara Barat.....	39
Tabel 18.	Perkembangan Indeks Variabel IDI Nusa Tenggara Barat, 2015-2016.....	40

# PENDAHULUAN

## I. LATAR BELAKANG

Kondisi politik yang stabil merupakan modal penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Stabilitas situasi politik akan memberikan kenyamanan dan kepastian dalam berinvestasi dan berusaha. Berbagai perubahan sistem politik yang terjadi di Indonesia menciptakan perbedaan yang signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya. Ketika reformasi 1998 bergulir dan mengakhiri masa orde baru, situasi politik nasional pun mengalami tuntutan serupa untuk berubah dan berbenah. Kekuasaan penyelenggaraan negara yang sebelumnya berjalan tersentral di pusat pada masa orde baru, perlahan mengalami perubahan untuk mengakomodir tuntutan reformasi. Tuntutan pendistribusian kekuasaan tersebut terjadi dalam 2 level, horizontal dan vertikal. Di level horizontal, lembaga-lembaga negara diluar eksekutif diperkuat agar dapat melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah. Di level vertikal, adanya pemberlakuan otonomi daerah yang mendelegasikan berbagai kewenangan yang sebelumnya merupakan otoritas pusat sehingga bisa dikeola secara otonom oleh pemerintah daerah.

Perubahan-perubahan situasi politik tersebut juga terjadi di Nusa Tenggara Barat. Berbagai kepentingan dalam masyarakat diberikan ruang untuk menyalurkan aspirasinya, diantaranya melalui jalur formal dengan membentuk partai politik di daerah. Secara umum, partai-parti politik yang bermunculan di daerah merupakan kepanjangan dari parpol di pusat.

Selain itu, perubahan budaya politik yang semakin terbuka juga menjadi aspek yang penting. Media cetak ataupun elektronik menjadi leluasa memberikan kritik terhadap pemerintah. Organisasi-organisasi masyarakat baru bermunculan sebagai wadah masyarakat

---

menyampaikan kepentingannya. Kebebasan menyalurkan pendapat dan berpolitik dijamin oleh berbagai aturan.

Diantara isu penting yang muncul adalah tuntutan peningkatan keterwakilan perempuan dalam dunia politik. Pada pemilu 2014 ketentuan kuota minimal 30% perempuan dalam daftar calon tetap (DCT) dengan sistem zipper (minimal terdapat satu orang perempuan dalam tiga calon) telah masuk dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.

Perkembangan bidang politik yang demikian cepat seringkali berimbas, baik langsung maupun tidak, terhadap kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan itu, upaya untuk mewujudkan terciptanya situasi dan kondisi politik yang kondusif merupakan langkah strategis yang perlu terus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan nasional, yaitu menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur.

Publikasi Statistik Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat 2016 ini disusun untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik politik secara berkala dan berkesinambungan yang dapat menggambarkan perkembangan politik di NTB. Ketersediaan data ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan publikasi ini adalah memberikan gambaran makro mengenai situasi politik masyarakat NTB. Tujuan khususnya adalah untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik hasil pemilukada terakhir di Kabupaten/kota dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan pembangunan politik.

---

### **III. RUANG LINGKUP**

Publikasi Statistik Politik NTB 2016 menyajikan gambaran politik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi di wilayah NTB.

### **IV. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Publikasi ini secara keseluruhan disajikan dalam tiga bagian (bab) yang disusun secara sistematis. Bab I menjelaskan latar belakang dan tujuan penyusunan publikasi, sedangkan Bab II menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini meliputi jenis dan sumber data, konsep/definisi dan penjelasan teknis tentang statistik/indikator yang disajikan. Bab III menjelaskan gambaran umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bab terakhir adalah menyajikan gambaran umum politik (Bab IV).



---

<http://ntb.bps.go.id>

---

# METODOLOGI

## I. JENIS DAN SUMBER DATA

Data yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari data BPS dan data sekunder dinas/instansi dengan cara kompilasi hasil registrasi/catatan. Data BPS berasal dari hasil proyeksi penduduk, dan Indeks Demokrasi Indonesia sedangkan data dinas/instansi terkait, antara lain berasal dari Polres/Polresta/Polda, KPU, Kesbangpol, dan Sekretariat Dewan Nusa Tenggara Barat yang dikumpulkan melalui Survei Politik dan Keamanan.

## II. KONSEP DAN DEFINISI

### **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, memiliki fungsi legislasi (membuat peraturan daerah), penyusunan anggaran, dan pengawasan kerja pemerintah daerah.

### **Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang memiliki struktur berjenjang di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

### **Partai Politik**

Partai Politik adalah organisasi penyalur keterlibatan warga negara dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik.

### **Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung,

---

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 8/2012).

### **Peserta Pemilu Legislatif**

Peserta pemilu legislatif adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD (UU No.10/2008).

### **Otonomi Daerah**

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004).

### **Golongan Putih**

Golongan putih (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah hasil pengurangan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih.

### **Warga Negara Indonesia**

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008).

### **Pemilih**

Pemilih adalah warga Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah pernah kawin (Undang-Undang Nomor 0 Tahun 2008)

---

### **Partisipasi Penduduk Dalam Pemilu**

Partisipasi Penduduk Dalam Pemilu adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.

### **Partisipasi Politik**

Partisipasi Politik adalah keterlibatan warganegara dalam mempengaruhi kebijakan. Partisipasi politik digolongkan menjadi 2, konvensional seperti memilih dalam pemilu atau diskusi-diskusi politik, serta non konvensional seperti demonstrasi dan mogok

<http://ntb.bps.go.id>

---

<http://ntb.bps.go.id>

---

## GAMBARAN UMUM PROVINSI NTB

Posisi geografis Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terletak pada  $115^{\circ}46'$  –  $119^{\circ}5'$  Bujur Timur dan  $8^{\circ}10'$  –  $9^{\circ}5'$  Lintang Selatan. NTB merupakan salah satu provinsi dan berada di kawasan Timur Indonesia, yang terletak diantara Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. NTB dikenal sebagai daerah Bumi Gora (Gogo-Rancah) artinya bumi yang dapat ditanami padi baik di daerah kering maupun di daerah basah.

Letak NTB yang berbatasan langsung dengan daerah tujuan wisata dunia yaitu Provinsi Bali, sedikit banyak memberi dampak terhadap kegiatan pariwisata di NTB. Banyak kawasan wisata alam di Provinsi NTB yang sangat bagus pemandangan alam dan pantainya. Seperti: Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Pantai Senggigi, Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan, Pantai Kuta, Pantai Lakey dan obyek wisata lainnya.

Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 20.153,15 km<sup>2</sup>, terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, serta ratusan pulau-pulau kecil. Luas Pulau Sumbawa mencapai tiga kali luas Pulau Lombok. Sebanyak 280 pulau terdapat di Provinsi NTB dan baru 32 pulau yang berpenghuni. Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 (delapan) kabupaten dan 2 (dua) kota dengan 116 kecamatan dan 1.141 desa/kelurahan. Kabupaten Sumbawa mempunyai jumlah kecamatan yang paling banyak, yaitu 24 kecamatan dan kabupaten yang paling banyak mempunyai jumlah desa/kelurahan, yaitu Kabupaten Lombok Timur sebanyak 254 desa/kelurahan.

Persebaran penduduk di NTB tampak tidak merata baik antar pulau maupun kabupaten/kota. Penduduk lebih banyak bertempat tinggal di Pulau Lombok dibandingkan Pulau Sumbawa. Penduduk terbesar berada di Kabupaten Lombok Timur yaitu 1.173.781 jiwa dan yang terendah adalah penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu

---

sebesar 137.072 jiwa. Dengan luas wilayah yang lebih sempit, Pulau Lombok dihuni oleh 3,434 juta jiwa atau sekitar 70,15 persen dari jumlah penduduk di Nusa Tenggara Barat dan pulau Sumbawa yang lebih luas hanya dihuni oleh sekitar 1,461 juta jiwa atau 29,85 persen dari jumlah penduduk NTB.

<http://ntb.bps.go.id>

# GAMBARAN UMUM POLITIK NTB

## I. PEMILU LEGISLATIF TERAKHIR

Dinamika politik di Indonesia juga dirasakan di NTB. Hal ini tercermin dari banyaknya partai politik yang mendapat kursi di DPRD baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat NTB. Di tingkat provinsi, hasil perolehan suara pemilu legislatif 2014 sesuai urutan dari terbanyak adalah sebagai berikut: Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Bintang Restorasi.

Tabel 3 sampai dengan Tabel 12 menyajikan data tentang jumlah anggota DPRD menurut partai politik dan kabupaten/kota di NTB tahun 2016. Dalam tabel-tabel tersebut tampak bahwa jumlah partai yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten/kota berkisar antara 10 sampai dengan 12 partai. Kabupaten/kota di Pulau Lombok dikuasai oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat.

Partai Golkar memenangi pemilu legislatif di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kota Mataram, sedangkan Partai Demokrat memenangi pemilu legislatif di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara. Di Pulau Sumbawa, semua pemilu legislatif dimenangi oleh PAN kecuali di Kabupaten Sumbawa.

Dua kabupaten/kota dengan jumlah anggota DPRD terbanyak di NTB adalah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah dengan masing-masing anggota sebanyak 50 orang. Dari keterwakilan perempuan di legislatif, Kabupaten Sumbawa Barat merupakan satu-satunya kabupaten yang semua kursinya diisi oleh laki-laki.

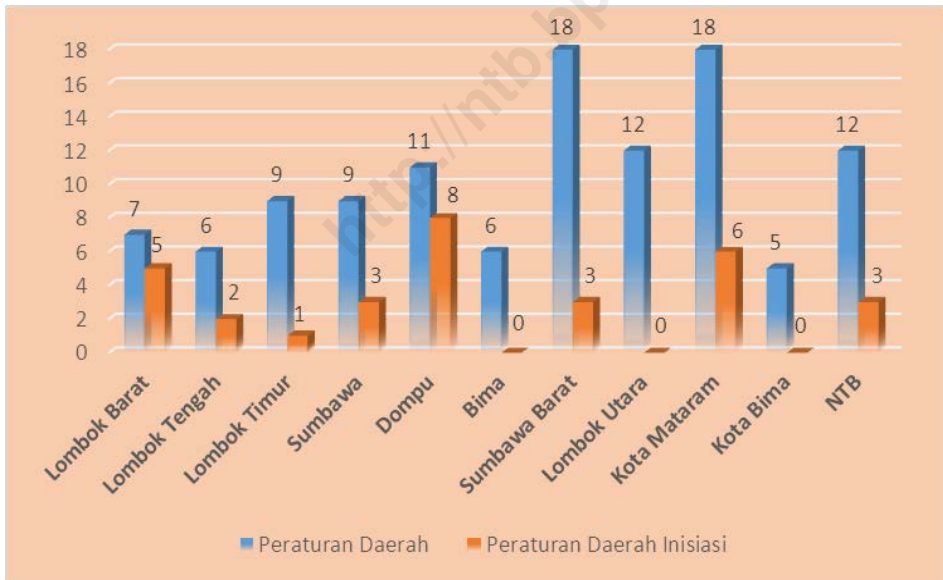


## II. PERAN DPRD

Salah satu peran DPRD adalah menyusun peraturan daerah (perda) baik berdasarkan usulan pihak eksekutif maupun yang diinisiasikan oleh DPRD. Di level provinsi, pada tahun 2016 DPRD menghasilkan perda sebanyak 12 buah. Dari jumlah tersebut, 3 diantaranya merupakan inisiasi dari DPRD.

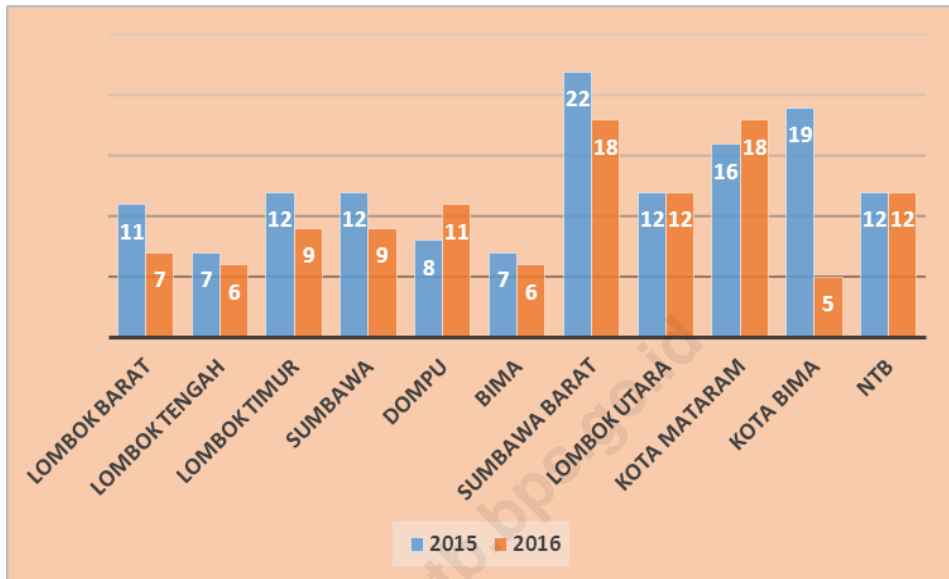
Selama tahun 2016, peraturan daerah paling banyak dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dan DPRD Kota Mataram, masing-masing sebanyak 18 perda. Sedangkan yang paling sedikit menghasilkan peraturan daerah adalah DPRD Kota Bima dengan 5 perda.

Gambar 1.  
Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB 2016



Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

Gambar 2.  
Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan DPRD Provinsi dan  
Kabupaten/Kota Tahun 2015-2016



Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

### III. PEMILUKADA TERAKHIR

Dinamika aturan bernegara menyebabkan istilah-istilah politik terkait penyelenggaraan pemilu di daerah juga mengalami perubahan. Berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004, Pilkada di bawah era Otonomi Daerah terkait penyelesaian sengketa ada di Mahkamah Agung (MA). Kemudian muncul UU yang baru nomor 22 tahun 2007, yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari Pemilu sehingga disebut Pemilukada. Penyelenggaraannya sudah langsung di bawah koordinasi KPU secara nasional dan penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya tahun 2011 terbit undang-undang No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam undang-undang itu tidak lagi disebut Pemilukada tetapi disebut

---

dengan pemilihan gubernur, pemilihan bupati, atau pemilihan walikota. Hal itu sesuai dengan UUD yang menyebutkan gubernur, bupati dan walikota dipilih secara demokratis. Sehingga bukan disebut kepala daerah tetapi disebut langsung jabatannya yaitu gubernur, walikota atau bupati.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan capaian baru dalam demokrasi di Indonesia. Melalui mekanisme tersebut, secara prosedural kedaulatan politik benar-benar berada di tangan rakyat. Melalui Pilkada secara langsung, aspirasi rakyat dalam menentukan sendiri para pemimpin eksekutif daerah tersampaikan secara utuh tanpa distorsi sebagaimana jika dipilih oleh DPRD. Format pilkada secara langsung didasarkan pada Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) menyusul keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan *judicial review* sejumlah KPUD atas UU tersebut. Sebagai operasionalisasi dari UU No.32/2004 dan Perpu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.6 tahun 2005 yang kemudian diubah menjadi PP No.17 tahun 2005.

Berkaitan dengan pencalonan, berbagai regulasi tentang pilkada mengatur bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang perolehan kursi dan atau suaranya minimal 15 persen. Pada mulanya hanya partai atau gabungan partai yang memperoleh suara/kursi minimal 15 persen di DPRD saja yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun kemudian dibuka juga bagi gabungan partai yang berada di luar parlemen lokal tersebut.

Mengenai mekanisme pencalonan ayat 1, 3, dan 5 Pasal 37 PP No. 6/2005 secara berturut-turut mengatur bahwa:

1. Parpol atau gabungan parpol hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon;

2. Parpol atau gabungan parpol sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon;
3. Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik.

Tabel 13 sampai dengan tabel 17 menyajikan data tentang pelaksanaan pilkada, jumlah pemilih, jumlah pasangan calon, dan karakteristik pasangan terpilih pada pilkada tingkat kabupaten/kota terakhir di NTB. Pelaksanaan pilkada tingkat kabupaten/kota di Kabupaten Lombok Timur, dan Kota Bima dilaksanakan secara bersamaan pada tanggal 13 Mei 2013 (bersamaan dengan Pemilihan Gubernur terakhir). Di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Mataram pilkada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, sedangkan di Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 23 September 2013 dan Kabupaten Bima tanggal 15 Desember 2015.

Persentase suara yang sah dan persentase perolehan suara pasangan yang sah untuk masing-masing kabupaten/kota cukup bervariasi, demikian juga persentase perolehan suara bagi pasangan terpilih. Persentase suara yang sah terhadap jumlah DPT terbesar, lebih dari 93 persen ada di Kabupaten Dompu dalam pemilukada di tahun 2015. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa pembangunan politik di Kabupaten Dompu sudah cukup baik. Kota Mataram merupakan wilayah dengan persentase suara sah terhadap DPT terendah dibanding kabupaten/kota lain se-NTB dengan besaran 51 persen.

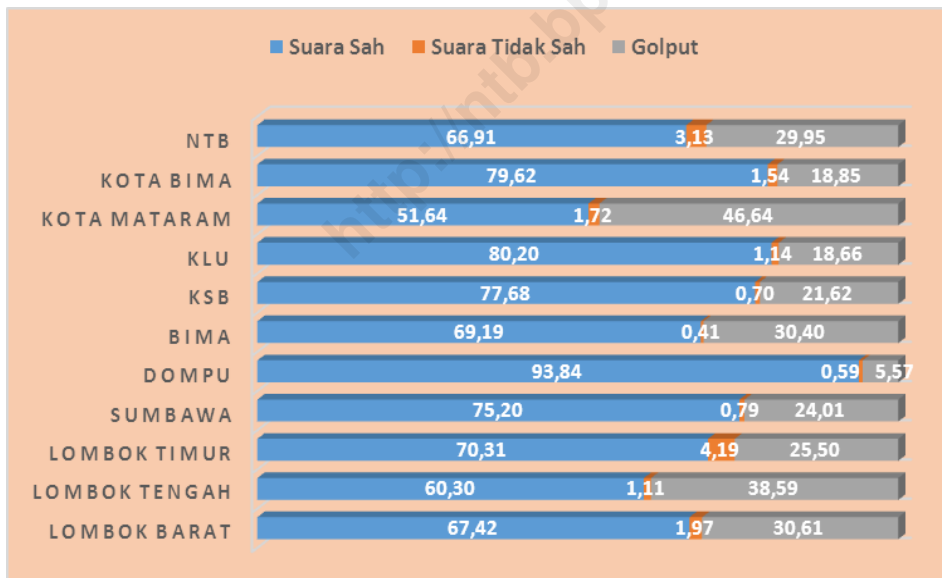
Pemilukada yang diselenggarakan di Kota Bima diikuti oleh 7 pasangan calon (paslon), terbanyak diantara pemilukada di

kabupaten/kota lainnya. Banyaknya jumlah paslon tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan persentase perolehan suara paslon pemenang di pemilukada Kota Bima adalah yang terendah dibanding paslon pemenang di pemilukada kabupaten/kota yang lain.

Satu-satunya pemilukada yang menghasilkan pemenang dari calon independen (tidak dicalonkan oleh partai politik) adalah pemilukada di Kabupaten Lombok Timur. Semua kepala daerah yang terpilih di pemilukada di wilayah NTB adalah laki-laki kecuali di Kabupaten Bima. Selain sebagai satu-satunya kepala daerah perempuan di wilayah NTB, usia saat terpilihnya juga yang termuda diantara kepala daerah yang lain.

Gambar 3.

Persentase Pemilih dalam Pemilukada Terakhir Menurut Hasil Perolehan Suara dan Kabupaten/kota di NTB



Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

#### IV. PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI NTB

Menurut konsep demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka yang mewakili rakyat yang dipilih di bawah sistem pemerintahan. Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Namun secara praktek di lapangan demokrasi diterapkan secara berbeda-beda. Penerapan demokrasi beragam, sering kali diterapkan secara sepihak oleh penguasa. Oleh karena itu untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan demokrasi di suatu wilayah dan terdapat keterbandingan antar wilayah diperlukan instrumen yang universal.

*Freedom House* melakukan pengukuran demokrasi pada tahun 1972 menggunakan klasifikasi *free countries*, *partly free countries*, dan *non free countries*. Sejak tahun 2008, Negara Indonesia termasuk dalam *free countries*, sementara sebelumnya digolongkan dalam negara *partly free countries*. Untuk mengukur pembangunan demokrasi sampai level provinsi, sejak tahun 2007, Indonesia telah mengembangkan pengukuran demokrasi yang berbasis provinsi yang disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Pada dasarnya IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia.

Pengumpulan data IDI mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui *focus group discussion* (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat

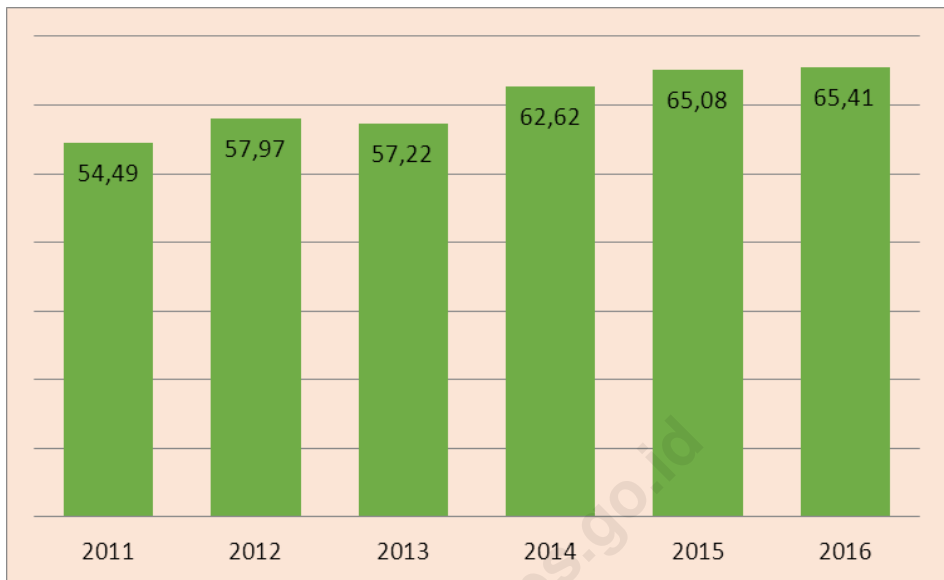
---

kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya.

Dari sisi penghitungan Indeks, IDI harus melalui tiga tahapan proses yakni *pertama*, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; *kedua*, menghitung indeks provinsi; dan *ketiga*, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Indeks masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Penghitungan IDI dilakukan pada tahun berikutnya misalnya IDI Tahun 2009 diukur tahun 2010, IDI tahun 2010 diukur pada tahun 2011 dan seterusnya. Metode pengumpulan data IDI sesuai prosedur menggunakan beberapa tahap seperti koding koran, koding dokumen, FGD dan wawancara mendalam.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) NTB 2016 sebesar 65,41 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini naik 0,33 poin dibandingkan dengan IDI NTB 2015 yang sebesar 65,08. Dengan pencapaian nilai IDI tahun ini, tingkat kinerja demokrasi di NTB tetap pada kategori sedang. Perkembangan IDI NTB dari 2011 hingga 2016 mengalami fluktuasi (2011 sebesar 54,49; 2012 sebesar 57,97; 2013 sebesar 57,22; 2014 sebesar 62,62; 2015 sebesar 65,08; 2016 sebesar 65,41).

Gambar 4.  
Perkembangan Indeks Demokrasi NTB, 2011 - 2016



Sumber: Survei Indeks Demokrasi Indonesia

Angka IDI 2016 tersebut merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yakni aspek kebebasan sipil dengan nilai 65,06; aspek hak-hak politik sebesar 62,08; dan aspek lembaga demokrasi sebesar 71,13. Secara lebih rinci, pada 2016 distribusi indeks dalam ketiga aspek demokrasi yang diukur terlihat aspek hak-hak politik dan kebebasan sipil mengalami kenaikan berturut-turut 0,97 dan 13,47 poin. Sementara nilai indeks lembaga demokrasi mengalami penurunan 17,23 poin.

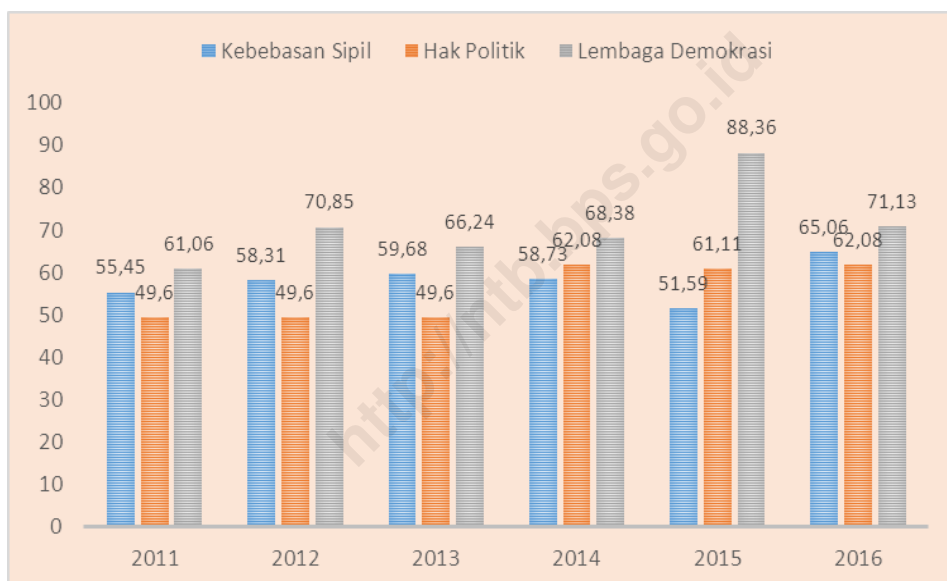
Berbeda dengan tahun 2015, pada tahun 2016 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori "buruk". Untuk indeks aspek Kebebasan Sipil berada di kategori "sedang", naik dibandingkan tahun 2015 yang berada di kategori "buruk". Indeks aspek Hak-Hak Politik tetap pada kategori "sedang", sementara aspek Lembaga Demokrasi yang di tahun



sebelumnya berada pada kategori “baik”, di tahun 2016 ini turun menjadi kategori “sedang”.

Dari data IDI 2016 diperoleh informasi variabel-variabel yang perlu mendapat perhatian lebih, diantaranya variabel kebebasan berkeyakinan, variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, variabel peran DPRD, dan terakhir variabel peran birokrasi pemerintah daerah.

Grafik 5.  
Perkembangan Aspek Indeks Demokrasi Indonesia NTB, 2011-2016



Sumber: Survei Indeks Demokrasi Indonesia

---

TABEL-TABEL

<http://ntb.bps.go.id>

---

<http://ntb.bps.go.id>

---

Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/kelurahan, dan Penduduk di NTB Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lombok Barat	1,053.87	10	122	665,132
Lombok Tengah	1,208.40	12	139	922,088
Lombok Timur	1,605.55	20	254	1,173,781
Sumbawa	6,643.98	24	166	445,503
D o m p u	2,324.60	8	81	241,888
B i m a	4,389.40	18	193	473,890
Sumbawa Barat	1,849.02	8	65	137,072
Lombok Utara	809.53	5	33	214,393
Kota Mataram	61.30	6	50	459,314
Kota Bima	207.50	5	38	163,101
<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>20,153.15</b>	<b>116</b>	<b>1141</b>	<b>4,896,162</b>

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk 2010-2020

Tabel 2. Jumlah Anggota DPRD Provinsi menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat Tahun 2016

Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
PARTAI GOLKAR	10	1	11
PARTAI DEMOKRAT	7	1	8
PARTAI GERINDRA	8	-	8
PKS	6	-	6
PPP	5	1	6
PARTAI HANURA	4	1	5
PDI-P	5	-	5
PAN	5	-	5
PKB	4	1	5
PARTAI BINTANG RESTORASI	5	1	6
<b>Jumlah</b>	<b>59</b>	<b>6</b>	<b>65</b>

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

Tabel 3. Jumlah Anggota DPRD menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Lombok Barat Tahun 2016

Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
PARTAI GOLKAR	5	1	6
PARTAI NASDEM	5	-	5
PARTAI GERINDRA	3	2	5
PKB	5	-	5
PAN	4	-	4
PPP	4	-	4
PDI-P	4	-	4
PKNI	1	-	1
PKS	2	1	3
PBB	1	1	2
PARTAI HANURA	1	2	3
PARTAI DEMOKRAT	3	-	3
<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>7</b>	<b>45</b>

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

Tabel 4. Jumlah Anggota DPRD menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Lombok Tengah Tahun 2016

Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
PARTAI GOLKAR	8	1	9
PARTAI DEMOKRAT	5	-	5
PKB	5	1	6
PKS	5	-	5
PDI-P	2	-	2
PARTAI GERINDRA	5	1	6
PPP	4	1	5
PBB	4	-	4
PARTAI NASDEM	4	-	4
PARTAI HANURA	3	-	3
PKPI	1	-	1
<b>Jumlah</b>	<b>46</b>	<b>4</b>	<b>50</b>

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

Tabel 5. Jumlah Anggota DPRD menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Lombok Timur Tahun 2016

Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
PARTAI DEMOKRAT	7	-	7
PARTAI GOLKAR	5	-	5
PARTAI HANURA	5	-	5
PAN	5	-	5
PARTAI GERINDRA	5	-	5
PKS	5	-	5
PDI-P	2	2	4
PKB	4	-	4
PPP	3	-	3
PBB	3	-	3
PARTAI NASDEM	3	-	3
PKPI	1	-	1
<b>Jumlah</b>	<b>48</b>	<b>2</b>	<b>50</b>

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan



Tabel 6. Jumlah Anggota DPRD menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Sumbawa Tahun 2016

Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
PDI-P	6	-	6
PARTAI GOLKAR	6	-	6
PARTAI HANURA	6	-	6
PPP	5	-	5
PARTAI GERINDRA	5	-	5
PAN	4	1	5
Partai Demokrasi Rakyat	4	-	4
PARTAI NASDEM	4	-	4
PBB	1	-	1
PKPI	1	-	1
Jumlah	42	1	43

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

Tabel 7. Jumlah Anggota DPRD menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Dompu Tahun 2016

Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
PAN	4	-	4
PPP	3	-	3
PKB	2	1	3
PKS	3	-	3
PDI-P	2	1	3
PBB	2	1	3
PARTAI NASDEM	3	-	3
PARTAI GERINDRA	3	-	3
PARTAI DEMOKRAT	2	-	2
PARTAI GOLKAR	2	-	2
PARTAI HANURA	1	-	1
<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>30</b>

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

Tabel 8. Jumlah Anggota DPRD menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Bima Tahun 2016

Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
PAN	6	1	7
PARTAI GOLKAR	6	-	6
PARTAI NASDEM	2	1	3
PARTAI HANURA	4	-	4
PKB	2	1	3
PKS	4	-	4
PDI-P	3	-	3
PARTAI GERINDRA	4	-	4
PARTAI DEMOKRAT	5	-	5
PPP	3	1	4
PBB	1	1	2
<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>45</b>

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

Tabel 9. Jumlah Anggota DPRD menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Sumbawa Barat Tahun 2016

Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
PAN	3	-	3
PBB	3	-	3
PARTAI NASDEM	1	-	1
PKB	2	-	2
PKS	1	-	1
PDI-P	3	-	3
PARTAI GOLKAR	2	-	2
PARTAI GERINDRA	3	-	3
PARTAI DEMOKRAT	2	-	2
PPP	1	-	1
PARTAI HANURA	2	-	2
PKPI	2	-	2
<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>25</b>

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

Tabel 10. Jumlah Anggota DPRD menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Lombok Utara Tahun 2016

Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
PARTAI DEMOKRAT	3	2	5
PARTAI GOLKAR	4	-	4
PARTAI GERINDRA	3	-	3
PAN	3	-	3
PDI-P	3	-	3
PARTAI HANURA	3	-	3
PPP	2	-	2
PARTAI NASDEM	2	-	2
PKB	2	-	2
PBB	1	-	1
PKS	1	-	1
PKPI	1	-	1
<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>30</b>

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

Tabel 11. Jumlah Anggota DPRD menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Mataram Tahun 2016

Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
PARTAI GOLKAR	7	2	9
PARTAI GERINDRA	5	1	6
PDI-P	5	-	5
PPP	5	-	5
PARTAI DEMOKRAT	3	1	4
PKS	3	-	3
PARTAI HANURA	2	-	2
PARTAI NASDEM	2	-	2
PKPI	2	-	2
PAN	1	-	1
PKB	-	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	<b>40</b>

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

Tabel 12. Jumlah Anggota DPRD menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Bima Tahun 2016

Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
PAN	4	-	4
PARTAI GERINDRA	3	-	3
PARTAI GOLKAR	3	-	3
PDI-P	3	-	3
PPP	3	-	3
PKS	2	-	2
PARTAI DEMOKRAT	1	1	2
PARTAI NASDEM	-	1	1
PARTAI HANURA	1	-	1
PBB	-	1	1
PKPI	1	-	1
PKB	1	-	1
<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>25</b>

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

Tabel 13. Jumlah Penduduk yang Terdaftar dalam Pemilu Legislatif Terakhir dan Hasil Perolehan Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Golput di Nusa Tenggara Barat

Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih	Perolehan Suara		
		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Golput
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lombok Barat	456,584	307,809	8,999	139,776
Lombok Tengah	771,908	460,468	8,487	294,673
Lombok Timur	876,026	615,899	36,720	223,407
Sumbawa	326,367	245,419	2,588	78,360
D o m p u	162,323	135,432	858	8,033
B i m a	380,035	262,950	1,553	115,532
Sumbawa Barat	92,684	71,999	653	20,037
Lombok Utara	159,272	127,739	1,813	29,720
Kota Mataram	297,982	159,348	5,292	143,926
Kota Bima	105,446	83,952	1,619	19,873
<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>3,499,265</b>	<b>2,341,492</b>	<b>109,594</b>	<b>1,048,179</b>

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan



Tabel 14. Waktu Pelaksanaan dan Banyaknya Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota Terakhir di Nusa Tenggara Barat

Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pemilihan	Jumlah Pasangan Calon
(1)	(2)	(3)
Lombok Barat	23 September 2013	4
Lombok Tengah	9 Desember 2015	5
Lombok Timur	13 Mei 2013	4
Sumbawa	9 Desember 2015	3
D o m p u	9 Desember 2015	4
B i m a	15 Desember 2015	4
Sumbawa Barat	9 Desember 2015	3
Lombok Utara	9 Desember 2015	2
Kota Mataram	9 Desember 2015	2
Kota Bima	13 Mei 2013	7
<b>Nusa Tenggara Barat</b>	13 Mei 2013	4

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

Tabel 15. Jumlah Pemilih Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat

Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih	Suara Sah	% Suara Sah terhadap Jumlah Pemilih
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	456,584	307,809	67.42
Lombok Tengah	771,908	460,468	59.65
Lombok Timur	876,026	615,899	70.31
Sumbawa	326,367	245,419	75.20
D o m p u	162,323	135,432	83.43
B i m a	380,035	262,950	69.19
Sumbawa Barat	92,684	71,999	77.68
Lombok Utara	159,272	127,739	80.20
Kota Mataram	297,982	159,348	53.48
Kota Bima	105,446	83,952	79.62
<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>3,499,265</b>	<b>2,341,492</b>	<b>66.91</b>

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

Tabel 16. Perolehan Suara dan Partai Pendukung Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat

Kabupaten/Kota	Perolehan		Partai Pendukung
	Jumlah	Persentase (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	188,994	61.40	Golkar, PAN, Demokrat, Hanura, PDI-P dan PDK
Lombok Tengah	460,468	46.34	PKS dan Gerindra
Lombok Timur	272,726	42.28	Independen
Sumbawa	117,458	47.86	Demokrat, PDI-P
D o m p u	49,979	36.74	Gerindra, Nasdem, Hanura
B i m a	105,506	40.12	Golkar, Hanura, Gerindra
Sumbawa Barat	30,732	42.68	PDI-P, PBB, PKS, PKPI, Partai Nasdem, PKB
Lombok Utara	68,335	52.75	Gerindra, PDI-P, PKB, PKS, PPP
Kota Mataram	159,348	77,27	PKS, PKB, Partai Hanura, PAN, PKPI, Partai Nasdem
Kota Bima	22,732	33.03	Partai Demokrat, PDI-P, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>1,038,638</b>	<b>44.00</b>	<b>Partai Demokrat</b>

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

Tabel 17. Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Hasil Pilkada Terakhir Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, Usia dan Jabatan Sebelumnya di Nusa Tenggara Barat

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Usia Saat Terpilih	Jabatan/ Pekerjaan Sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lombok Barat	Laki-laki	S-3	59	Bupati Lobar
Lombok Tengah	Laki-laki	S-1	49	Bupati
Lombok Timur	Laki-laki	S-1	68	Wiraswasta
Sumbawa	Laki-laki	D-III	61	Anggota DPRD Provinsi NTB
D o m p u	Laki-laki	S-1	51	Bupati
B i m a	Perempuan	Paket C	36	Wakil Ketua DPRD
Sumbawa Barat	Laki-laki	S-3	52	Sekda Kab Sumbawa Barat
Lombok Utara	Laki-laki	S-3	44	Wakil Bupati
Kota Mataram	Laki-laki	SMA	55	Walikota
Kota Bima	Laki-laki	SMA	46	Walikota
<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>S-3</b>	<b>40</b>	<b>Gubernur NTB</b>

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

Tabel 18. Perkembangan Indeks Variabel IDI Nusa Tenggara Barat, 2015-2016

Nama Variabel	2015	2016	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	100.00	100.00	0.00
Kebebasan Berpendapat	70.83	72.23	1.40
Kebebasan Berkeyakinan	21.80	44.59	22.79
Kebebasan dari Diskriminasi	99.90	100.00	0.10
Hak Memilih dan Dipilih	72.24	74.17	1.93
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	47.98	50.00	2.02
Pemilu yang Bebas dan Adil	100.00	100.00	0.00
Peran DPRD	65.51	52.94	-12.57
Peran Partai Politik	100.00	100.00	0.00
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	78.64	26.17	-52.47
Peran Peradilan yang Independen	100.00	87.50	-12.50

Sumber: Survei Indeks Demokrasi Indonesia

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Gunung Rinjani No. 2 Mataram 83125  
Telp. 0370 621385, Fax. 0370 623801  
email : [ntb@bps.go.id](mailto:ntb@bps.go.id)